

**EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
DESA GERINGGING BARU KECAMATAN SENTAJO RAYA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu
Program Studi Administrasi Negara*



OLEH :

**IDAYAH NURCAHYATI
NPM. 210411001**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2025**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
DESA GERINGGING BARU KECAMATAN SENTAJO
RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NAMA : IDAYAH NURCAHYATI

NPM : 210411001

UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS : ILMU SOSIAL

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

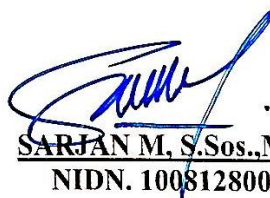
Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

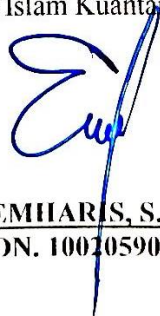
PEMBIMBING II



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Mengetahui

Ketua Program Studi Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 22
Bulan : Mei
Tahun : 2025

Tim Penguji

KETUA

SEKRETARIS



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402



SARJAN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

- | | | |
|---------------------------------|----------------------|---|
| 1. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si | (Pembimbing I) | () |
| 2. DESRIADI, S.Sos., M.Si | (Anggota Penguji I) | () |
| 3. SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si | (Anggota Penguji II) | () |

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IDAYAH NURCAHYATI

Npm : 210411001

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang saya susun ini adalah karya tulis saya sendiri. Skripsi ini merupakan asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan Doktor), baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di perguruan tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain atau sumber lain, telah saya tulis orang lain, telah saya tulis sumbernya dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 12 Februari 2025



IDAYAH NURCAHYATI
NPM. 210411001

MOTTO HIDUP

"Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan, di mana setiap langkah adalah pembelajaran dan setiap kesulitan adalah peluang untuk tumbuh. Dengan semangat, kerja keras, dan keyakinan kepada Tuhan, teruslah melangkah menuju tujuan, tanpa takut gagal, karena setiap kegagalan adalah pelajaran yang membawa lebih dekat pada kesuksesan. Percayalah bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang proses yang dijalani dengan penuh rasa syukur, keberanian, dan cinta kepada sesama"

(Idayah_Nurcahyati)

KATA PERSEMBAHAN

Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya menjadikan saya manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani hidup. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awalan mencapai kesuksesan.

Saya persembahkan karya kecil ini untuk Ayahhanda dan Ibunda tercinta. Terimakasih yang tiada henti memberikan semangat, do'a, nasehat, kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat menjalani hidup dan terima kasih kepada saudara laki-laki dan perempuan saya tersayang yang juga telah memberi saya semangat sampai hari ini.

Terima kasih banyak untuk bapak Emilia Emharis, S.Sos M.Si dan bapak Sarjan M. S.Sos M.Si yang telah banyak meluangkan waktu tenaga dan pikiran, serta memberikan dorongan semangat dan bantuan dalam proses pembimbingan. Dan kepada bapak dan ibu dosen pengajar serta seluruh staff Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan tambahan ilmu, bantuan administrasi dan bantuan lainnya dalam kelancaran studi peneliti.

Dan terima kasih juga kepada teman-teman tanpa dukungan dari kalian tak akan mungkin saya sampai disini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Angkatan 2021. Kalian semua bukan hanya menjadi teman, kalian adalah bagai saya. Semoga ilmu yang saya dapatkan bisa berguna di masa yang akan datang. Amiiin.

ABSTRAK

EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA GERINGGING BARU KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**IDAYAH NURCAHYATI
210411001**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan langsung tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin di Indonesia. PKH berfungsi sebagai salah satu program jaring pengaman bagi masyarakat miskin agar terlindungi dari kemungkinan kondisi krisis. PKH merupakan suatu usaha yang diarahkan kepada pembentukan dan sumber daya manusia fokus pada aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini dilakukan di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Indikator penelitian yang digunakan meliputi, efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, pemerataan, dan ketepatan. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu berusaha memberikan gambaran terhadap suatu fenomena dengan data berupa angka-angka yang ada mengenai permasalahan yang diteliti yaitu Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, menjelaskan data yang ada secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang tampak sehingga memberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Sudah Cukup Baik, dengan nilai keseluruhan indikator tersebut di dapatkan nilai rata-rata 3,67 berarti berada pada skala interval cukup baik. Hal ini dikarenakan dari 6 indikator yang digunakan pada penelitian ini yaitu, Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan menunjukkan semua indikatornya cukup baik.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH)

KATA PENGANTAR

“Bismillahirrahmanirrahim”

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”

Sholawat beserta Salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, karena beliau adalah panutan sejati umat Islam yang membawa manusia dari alam kegelapan sampai ke alam yang terang benderang serta penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata baik dari segi penulisan maupun pembahasan nya. Dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan, dukungan, serta perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang mana diantaranya kepada :

1. **Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I.,M.Pd.I** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. **Ibu Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial Universitas islam Kuantan Singingi.
3. **Bapak Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si** selaku kepala program Studi Administrasi Negara yang telah berkenan memberikan izin dalam skripsi penelitian ini dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

4. **Bapak Sarjan M, S.Sos.,M.Si** selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen serta seluruh Staff Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
6. Teristimewa untuk Ayahanda Yurnalis, Ibunda Nanik Rianti dan seluruh keluarga yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan, baik secara moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyusun penelitian ini.
7. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Administrasi Negara kelas A Angkatan tahun 2021 yang telah memotivasi, dan membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan penuh kesadaran penulis mengakui bahwa penelitian ini masih perlu disempurnakan. Penulis juga menyadari untuk menjadi lebih baik melalui proses. Setelah melalui proses akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan serta mampu memberikan makna yang positif bagi kemajuan pengetahuan, khususnya bidang Administrasi Negara.

Teluk Kuantan, 12 Februari 2025

Penulis,

IDAYAH NURCAHYATI
NPM. 210411001

DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO HIDUP	iv
KATA PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.4.1 Manfaat Teoritis	14
1.4.2 Manfaat Praktis	15
II. LANDASAN TEORI	16
2.1 Tinjauan Pustaka	16
2.1.1 Teori Administrasi Negara	16
2.1.2 Teori Kebijakan Publik	17
2.1.3 Teori Evaluasi Kebijakan	19
2.1.4 Program Penanggulangan Kemiskinan	21
2.1.5 Program Keluarga Harapan (PKH)	24
2.1.5.1 Kewajiban Peserta PKH	26
2.1.6 Teori Kemiskinan.....	27
2.1.7 Teori Pembangunan Manusia.....	32
2.2 Kerangka Pemikiran.....	34

2.3 Defenisi Operasional.....	35
2.3.1 Efektivitas.....	35
2.3.2 Efisiensi.....	36
2.3.3 Kecukupan.....	36
2.3.4 Perataan	36
2.3.5 Responsivitas.....	37
2.3.6 Ketepatan.....	37
2.4 Konsep Variabel.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Populasi dan Sampel	39
3.2.1 Populasi	39
3.2.2 Sampel.....	39
3.3 Sumber Data.....	41
3.3.1 Data Primer	41
3.3.2 Data Sekunder	41
3.4 Fokus Penelitian	42
3.5 Lokasi Penelitian.....	42
3.6 Metode Pengumpulan Data	42
3.6.1 Observasi.....	42
3.6.2 Kuesioner	43
3.6.3 Dokumentasi.....	43
3.7 Metode Analisis Data	43
3.8 Jadwal Penelitian.....	46
VI. PENUTUP	47
6.1 Kesimpulan	47
6.2 Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Indeks Bantuan Sosial PKH Berdasarkan Kategori Tahun 2020	5
1.2 Jumlah Penduduk Dengan Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin Yang Menerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.....	7
1.3 Data Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.....	8
2.1 Konsep Operasionalisasi Variabel Penelitian Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.....	38
3.1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.....	41
3.2 Jadwal Penelitian Tentang Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singing 2024.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.....	35

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan hampir menjadi permasalahan di semua negara, baik di negara maju maupun di negara sedang berkembang dengan tingkat permasalahan yang berbeda-beda. Di Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang, kemiskinan adalah suatu permasalahan yang mendasar dan sangat serius, dikarenakan kemiskinan membuat banyak masyarakat di Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan primer hidupnya, Seperti: sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan antara lain rendahnya pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya.

Kemiskinan adalah persoalan struktural dan kultural yang multi dimensi, yang melibatkan di dalamnya masalah politik, sosial, ekonomi, aset atau sumberdaya alam, psikologi dan lain-lain. Pada umumnya masyarakat miskin ialah suatu keadaan masyarakat yang berada dalam situasi rentan, tak berdaya, terisolasi dan tidak mampu untuk menyampaikan aspirasinya. Masalah ini masih banyak dialami oleh kaum perempuan dan mengakibatkan mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan minimal kehidupannya secara layak.

Di Indonesia saat ini permasalahan kemiskinan terlihat sudah sangat mendesak untuk ditangani. Terlihat secara nyata, khususnya di wilayah perdesaan kondisi masyarakat miskin dapat dilihat dari segi mereka yang tidak dapat

memenuhi kebutuhan dasar, sumber pendapatan yang terbatas, tidak memiliki sarana dan prasarana dasar, seperti perumahan yang memadai, kualitas lingkungan yang kotor dan tidak layak ditempati. Pada dasarnya, penanggulangan kemiskinan bukan hanya sekedar memberantas kemiskinan, namun lebih dari itu diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat manusia secara menyeluruh baik lahir maupun batin. Oleh karena itu menanggulangi kemiskinan bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi belaka, namun didalamnya terdapat materi-materi lain yang merupakan suatu kesatuan dari konsep penanggulangan kemiskinan itu sendiri, yang semuanya berjalan searah menuju suatu tujuan yang di damba-dambakan yaitu terciptanya kesejahteraan.

Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang kita ketahui adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program keluarga harapan yang kemudian disingkat PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau masyarakat miskin atau rentan yang terdaftar pada data terpadu program penanganan fakir miskin, disusun oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

Upaya Pemerintah agar meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin, dengan memberdayakan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, kemudian menjamin tercapainya pemakaian sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Agar menekan angka kemiskinan dan ketimpangan angka pendapatan, pemerintah harus menjalankan strategi kebijakan yang mendukung kesejahteraan penduduk miskin.

Program Keluarga Harapan (PKH) ini dijalankan sebagai amanah pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan berkaitan dengan Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi salah satu poinnya yaitu tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (Direktorat Jendral Anggaran Kementrian Keuangan 2015).

Pelaksanaan Perogram Keluarga Harapan (PKH) dijalankan atas dasar Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008, Keputusan Gubernur tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD", Keputusan Bupati/Walikota tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD", dan Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan (Direktorat Jendral Anggaran Kementrian Keuangan 2015).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan langsung tunai bersyarat kepada Rumah Tangga/Keluarga Sangat Miskin

(RTSM/KSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan serta komitmen yang berkaitan dengan usaha peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan (Pedoman Pelaksanaan PKH dalam Yelfi Maizella, 2021).

Menurut Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018, PKH ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan yang memiliki anggota keluarga ibu hamil atau menyusui, anak usia sekolah (5-21 tahun), dan anggota keluarga yang lanjut usia atau memiliki disabilitas berat dan permanen.

Untuk dapat menerima bantuan sosial PKH, calon penerima harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang dimana calon penerima harus memiliki e-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik.
2. Memiliki kartu keluarga sejahtera (KKS).
3. Penerima harus tergolong dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan, berdasarkan penilaian sosial ekonomi.
4. Penerima tidak boleh merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Kepolisian, atau Tentara Nasional Indonesia (TNI).
5. Penerima tidak boleh sedang menerima bantuan lain seperti Kartu Prakerja, BLT subsidi gaji, atau BLT UMKM.
6. Penerima harus terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) oleh Kementerian Sosial RI.

Besar bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) berbeda-beda, tergantung pada komposisi dan kondisi keluarga. Bantuan ini diberikan setiap bulan atau setiap

tiga bulan, tergantung pada kebijakan pemerintah daerah setempat. Bantuan ini diberikan dengan syarat, yaitu KPM (Keluarga Penerima Manfaat) harus memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu, seperti memastikan anak-anaknya bersekolah dan mendapatkan imunisasi, serta ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Adapun jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH) meliputi komponen bantuan yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 : Indeks Bantuan Sosial Pkh Berdasarkan Kategori Tahun 2020.

No	Kategori	Indeks/ Tahun (Rp)	Indeks/ Bulan (Rp)	Tambahan 25% (Rp)	Keterangan
1	Ibu hamil/ nifas	3.000.000	250.000	3.750.000	Maksimal kehamilan ke-2
2	Bayi/ balita 0-6 tahun	3.000.000	250.000	3.750.000	Maksimal 2 orang
3	Anak SD/ sederajat	900.000	75.000	1.125.000	Maksimal 1 orang
4	Anak SMP/ sederajat	1.500.000	125.000	1.875.000	Maksimal 1 orang
5	Anak SMA/ sederajat	2.000.000	166.000	2.498.000	Maksimal 1 orang
6	Disabilitas berat	2.400.000	200.000	3.000.000	Maksimal 1 orang
7	Lansia 70 tahun katas	2.400.000	200.000	3.000.000	Maksimal 1 orang

Sumber: Pendamping Pkh Desa Geringgong Baru Kecamatan Sentajo Raya 2024.

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah bantuan untuk setiap kategori berbeda-beda dan tentunya tidak semua anggota keluarga penerima

manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) mendapatkan bantuan, dikarenakan sudah ada ketentuan yang ada didalam keluarga penerima manfaat program keluarga Harapan (PKH) yang menerima bantuan maksimal sejumlah 4 orang. Cara menghitung jumlah bantuan diawali dari nilai bantuan terbesar.

Dalam satu keluarga, meskipun memiliki dua anak di jenjang yang sama seperti dua anak SD, SMP, atau SMA, bantuan PKH hanya diberikan kepada satu anak saja per jenjang. Ini karena pemerintah menerapkan prinsip pemerataan bantuan agar lebih banyak keluarga miskin yang bisa mendapatkan manfaat. Bantuan juga dibatasi maksimal empat komponen per keluarga. Sedangkan anak kuliah tidak masuk dalam kriteria PKH karena sasaran utama PKH adalah pendidikan dasar dan menengah, untuk mencegah putus sekolah sejak dini. Untuk anak kuliah sudah disediakan program tersendiri dari pemerintah seperti KIP Kuliah.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, yang mengatur bahwa bantuan hanya diberikan untuk komponen tertentu dan maksimal 4 komponen per keluarga.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, yang memperkuat prinsip tepat sasaran dan merata.

Prinsip Pemerataan Sosial dalam tujuan pembangunan nasional, yang sejalan dengan SDGs poin 1 (Tanpa Kemiskinan) dan poin 10 (Mengurangi Kesenjangan).

Kemiskinan desa merupakan suatu fenomena sosial dan ekonomi yang dimana penduduk daerah pedesaan menghadapi keterbatasan akses terhadap sumberdaya dan peluang yang diperlukan untuk mencapai taraf hidup yang layak.

Desa Geringging Baru adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sentajo Raya, yang merupakan salah satu desa tergolong miskin dan masih banyak sumber daya alam yang belum terlaksana dengan maksimal. Untuk itu Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya membutuhkan program ini. Adapun Rumah Tangga Sangat Miskkin (RTSM) yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 1.2 : Jumlah Penduduk Dengan Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin Yang Menerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Jumlah KK	Jumlah Penduduk			RTSM		Penerima PKH
		Lk	Pr	Jumlah	KK	%	
1	832	1.385	1.339	2.724	199	24%	88

Sumber: Kantor Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya 2024.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya sebanyak 832 KK dan yang tergolong dalam RTSM berjumlah 199 KK. Sedangkan yang mendapatkan program bantuan PKH hanya sebanyak 87, belum merata bahkan blum sampai setengah, persentase yang menerima PKH hanya 44%. Karna tingginya angka kemiskinan maka Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya perlu mendapatkan penerapan program PKH. Permasalahan ini menunjukkan bahwa PKH belum diterima rata oleh setiap RTSM.

Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya terdiri dari lima dusun.

Bantuan PKH ini tersebar di setiap dusun. Adapun RTSM yang menerima bantuan

PKH di setiap dusun dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.3 : Data Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Nama Penerima	Nama Dusun	Jumlah Bantuan Yang di Terima/ Tahun (Rp)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Supani	Sri Mekar	2.400.000	2.400.000	-	-	-
2	Suwadi		4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
3	Ida Sediarsih		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4	Kusniati		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5	Paijem		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
6	Tuminem		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
7	Margiatun		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8	Warnis		3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
9	Maidahlia		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
10	Yuni Krisliani		4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
11	Lilis Tiana		3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
12	Sri Hartati		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
13	Siti Handayani		3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
14	Tumijem		4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
15	Lela Asna		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
16	Sapri		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
17	Ratna Wilis		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
18	Sulastri		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
19	Sudek		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
20	Nyampen	Sri Katon	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
21	Rubinem		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
22	Yayah		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
23	Al Sutarsih		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
24	Titik Ismiatun		2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
25	Sudirjo		4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
26	Lilis Nur Badriyah		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
27	Supartini		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
28	Muayah		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
29	Ratmi		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

No	Nama Penerima	Nama Dusun	Jumlah Bantuan Yang di Terima/ Tahun (Rp)				
			2020	2021	2022	2023	2024
30	Entang Supriatna		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
31	Sutin		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
32	Sunarsih		3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
33	Mardalisa		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
34	Darmiyah		2.400.000	2.400.000	-	-	-
35	Itim Patmala	Sri Kanton	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
36	Yomirta Elia		4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
37	Hariyanti		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
38	Murti Ningsih		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
39	Ismawati Khaerani		2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
40	Sumarwi		4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
41	Gimah	Karang Sari	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
42	Suhaemi		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
43	Susiwati		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
44	Asnen		4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
45	Uyu Yuhanda		4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
46	Fitria Nur Rosida		4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
47	Jafri		4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
48	Wiyono		2.400.000	2.400.000	-	-	-
49	Daningsih		3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
50	Suparti		4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
51	Arif Nurhayati		3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
52	Ponijem		4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
53	Maryanto		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
54	Samirin		2.400.000	2.400.000	-	-	-
55	Lasini		2.400.000	2.400.000	2.400.000	-	-
56	Lasmini		2.400.000	2.400.000	2.400.000	-	-
57	Sudi Wiyono	Karang Ampel	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
58	Mintarsih		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
59	Paijem		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
60	Supiati		4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
61	Suprihatin		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
62	Juariyah		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
63	Muharmi-yanis		4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
64	Nurbaini		4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
65	Radiyem		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
66	Rini		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

No	Nama Penerima	Nama Dusun	Jumlah Bantuan Yang di Terima/ Tahun (Rp)				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Yunita						
67	Jumiran		2.400.000	2.400.000	-	-	-
68	Sugianti		3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
69	Harisa		2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
70	Radiyah		4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	2.400.000
71	Nurnani		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
72	Sulfi Harnita		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
73	Asmawati		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
74	Tawar		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
75	Etik Martini		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
76	Nanik Rianti		4.500.000	4.500.000	4.500.000	1.500.000	1.500.000
77	Rahayu Werdini N		3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
78	Yusniati		900.000	900.000	900.000	-	-
79	Nurmah		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
80	Ngatini		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
81	Sudarmin		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
82	Nurhayati		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
83	Semiatus		2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
84	Masnur		3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
85	Supri Hartini		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
86	Parti		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
87	Biso Moelyo		2.400.000	2.400.000	-	-	-
88	Herlina		-	-	-	-	975.000
Jumlah			246,4 juta	246,4 juta	232 juta	223,3 juta	224,275 juta

Sumber: Pendamping PKH Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya 2024.

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah peserta penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Dusun Sri Mekar dengan jumlah penerima sebanyak 19 orang, Dusun Sri Katon dengan jumlah penerima 21 orang, Dusun Karang Sari dengan jumlah penerima 16 orang, Dusun Karang Ampel dengan jumlah penerima 14 orang, dan Dusun Mawar dengan jumlah penerima 18 orang. Jadi dusun yang paling banyak menerima adalah Dusun Sri Katon sebanyak 21 orang.

Dari tabel diatas terlihat bahwa ada sebagian peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dananya tidak dicairkan lagi, hal tersebut dikarenakan data penerima manfaat tidak lagi terupdate di sistem pusat. Ini bisa terjadi karena beberapa faktor seperti perubahan alamat, perubahan status keluarga, atau bahkan kesalahan input data. Contohnya, ada seorang ibu rumah tangga yang dulu menerima PKH karena memiliki anak yang bersekolah di SD dan SMP, namun sekarang dia tidak lagi menerima PKH karena anaknya tidak bersekolah lagi. Hal ini menunjukkan bahwa data penerima manfaat tidak lagi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Penyebab lain, yaitu penerima manfaat tidak lagi memenuhi kriteria untuk menerima PKH. Kriteria penerima manfaat PKH bisa berubah dari waktu ke waktu, sehingga penerima manfaat yang dulu memenuhi kriteria bisa saja tidak lagi memenuhi kriteria dikemudian hari. Terdeteksi menerima Bantuan Sosial (BANSOS) lebih dari satu jenis, terdeteksi sudah mampu dan terdeteksi sudah meninggal dunia. Karena sudah tersinkron dengan data Dukcapil, maka data bantuan PKH akan secara otomatis mendeteksi apabila ada penerima yang sudah meninggal dunia. Jika di dalam KK penerima manfaat PKH yang meninggal dunia ini masih ada anggota keluarga yang layak menerima bantuan tersebut, maka anggota keluarga tersebut perlu meminta kepada pihak desa atau pendamping PKH untuk melakukan pengajuan ulang sebagai penerima bantuan PKH melalui aplikasi SIKS.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi telah dijalankan sejak tahun 2012

dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui bantuan sosial bersyarat, pelaksanaannya menghadapi beberapa tantangan, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya manusia. Salah satu masalah yang teridentifikasi adalah rendahnya tingkat pengunduran diri peserta Program Keluarga Harapan (PKH), selama kurang lebih 12 tahun penerapan PKH di desa Geringging Baru hanya dua orang yang mengundurkan diri. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam motivasi dan pemahaman penerima manfaat tentang tujuan program, yang mungkin disebabkan oleh ketidaksesuaian antara harapan mereka dengan kenyataan atau ketidakjelasan dalam proses pelaksanaan. Situasi ini juga mencerminkan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap komunikasi dan pendampingan yang dilakukan, untuk memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar memahami manfaat program dan dapat mengaksesnya dengan lebih baik.

Adapun kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Geringging Baru ialah membentuk kelompok yang dimana setiap kelompok ada ketuanya, mengadakan pertemuan dan diskusi rutin dalam waktu satu tahun sekali yang didampingi oleh pendamping program keluarga harapan. Pada pertemuan tersebut membahas tentang komitmen para peserta program keluarga harapan yang telah difasilitasi bagian pendidikan dan kesehatan, serta kesejahteraan sosial.

Permasalahan yang kerap terjadi dilapangan saat mengimplementasikan program ialah komunikasi antara pendamping dengan penerima ketika pihak pendamping mengarahkan serta memberi tekanan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) agar mau mengikuti prosedur ataupun aturan yang harus

dituruti, KPM (Keluarga Penerima Manfaat) harus bisa memenuhi kewajiban dan hak sebagai peserta penerima manfaat dari program PKH, terkadang masih ada sebagian masyarakat yang masih susah diatur dia hanya mengiyakan saja tanpa benar melaksanakan sesuai perintah serta arahan yang telah di jelaskan pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), contohnya seperti anak yang malas pergi sekolah, anak yang tidak lengkap atribut sekolah itu adalah tanggung jawab orang tua dan masih ada pula masyarakat malas keposyandu ketika waktu mengunjungi posyandu tiba.

Permasalahan lain yang sering muncul pula yaitu penyaluran bantuan PKH tidak tepat sasaran, bantuan PKH yang seharusnya diterima oleh keluarga miskin dan rentan justru jatuh ketangan orang yng tidak berhak (keluarga mampu), dan banyaknya protes-protes yang diajukan kepada pendamping program keluarga harapan yang bahwasanya ‘kenapa kami sebagian masyarakat tidak mendapatkan bantuan tersebut, padahal kami layak juga untuk menerima manfaat dari program itu’

Ada juga permasalahan lain dalam pelaksanaannya seperti kebanyakan keluarga penerima manfaat menggunakan bantuan dari program ini untuk keperluan lain, seperti belanja pakaian, perhiasan, membayar hutang dan hal hal yang lainnya yang sejatinya kesehatan dan pendidikan lebih penting dari hal tersebut. Padahal tujuan program keluarga harapan ialah untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Untuk itu diperlukan kontribusi pendamping program keluarga harapan dalam mendampingi keluarga penerima manfaat agar melakukan transformasi perubahan kesejahteraan hidup.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dituliskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana evaluasi program keluarga harapan (pkh) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi program keluarga harapan (pkh) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang membantu perkembangan ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam kehidupan berbirokrasi, khususnya untuk mengembangkan pengetahuan ilmu administrasi negara. Serta dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam

menambah pengetahuan dan bahan acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang dan diharapkan mampu memperkaya kajian administrasi, terutama mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan atau konsep bagi seluruh komponen masyarakat beserta pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh, Serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Menurut Budi Nugraha, dkk (2022:10) administrasi negara merupakan sebuah sistem yang dipakai suatu negara guna membantu pemerintahan dalam melengkapi keperluan masyarakat. Pada kehidupan modern seperti saat ini, negara lebih mengarah untuk berusaha memenuhi keperluan masyarakat, terutama dalam permasalahan pelayanan kesejahteraan rakyat, maka dibutuhkan adanya administrasi negara untuk melaksanakan tugas-tugasnya tersebut.

Masyarakat sebagai publik akan puas dengan kualitas pelayanannya yang berkualitas apabila ada prinsip-prinsip yang mendasarin pelayanan publik. Ketika prinsip-prinsip tersebut diterapkan atau diimplementasikan oleh aparatur negara, maka pelaksanaan pelayanan publik dapat menjadi efektif dan efisien.

Herbert A. Simon and Others dalam Hendrayady, dkk, (2022:13) menyatakan bahwa administrasi negara adalah “aktivitas kelompok yang melakukan kerjasama untuk melaksanakan tujuan bersama”.

Dimock dalam Budi Nugraha, dkk (2022:15) menyatakan administrasi juga termasuk bagian dari proses politik. Hal tersebut dapat dilihat melalui ilmu yang dipelajari tentang kekuasaan dari suatu organisasi atau kelembagaan politik dari suatu negara serta proses kegiatan ketatanegaraan yang dapat berjalan sesuai dengan tujuan-tujuan tertentu. Kekuasaan badan perwakilan politik dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan

pemerintah bidang legislatif, eksekutif, dalam koordinasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan ataupun sebagian.

Sehingga konsep dari administrasi negara adalah proses atau tindakan kerjasama aparatur negara dengan mengatur dan menjalankan kebijakan pelayanan secara efektif dan efisien kepada publik. Praktik-praktik manajemen juga diterapkan di dalam administrasi negara, hal itu didasari dalam agar dalam pelayanan terhadap publik sesuai dengan nilai efisiensi dan efektivitas sehingga adanya kepuasan dan balasan positif, juga demi pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan baik. Administrasi bukan hanya mengacu pada membuat kebijakan publik namun juga menaruh perhatian pada implementasi kebijakan tersebut terhadap pelayanan masyarakat dan permasalahan publik.

2.1.2 Teori Kebijakan Publik

Menurut Keban dalam Nurkaidah (2022:18) menyatakan bahwa kebijakan publik dapat dilihat melalui konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Kemudian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan sebagai suatu konsep filosofis, merupakan serangkaian prinsip, maupun kondisi yang diinginkan.
2. Sebagai sebuah produk, kebijakan dilihat sebagai serangkaian kesimpulan ataupun rekomendasi.
3. Sebagai sebuah proses, kebijakan dilihat sebagai sebuah cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi bisa mengetahui apa yang

diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya.

4. Sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Dari persepsi tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap produk kebijakan haruslah memperhatikan substansi dari keadaan sasaran dari kebijakan, melahirkan sebuah rekomendasi yang memperhatikan berbagai program yang dapat dijalankan dan diimplementasikan untuk mencapai tujuan suatu kebijakan.

Menurut Tangkilisan dalam Nurkaidah (2022:20) dalam pendekatan kepentingan dan kebijakan publik, peran pemerintah sangat diperlukan dengan berbagai alasan, yaitu:

1. Pemerintah dan kebijakan yang dijalankannya dibutuhkan untuk menjamin terjadinya mekanisme pasar yang sehat dan baik.
2. Peraturan pemerintah serta tindakan lainnya diperlukan apabila persaingan dalam pasar menjadi tidak efisien.
3. Pengaturan dan pertukaran berdasarkan perjanjian yang dibutuhkan dalam operasi pasar tidak dapat terjadi tanpa adanya proteksi dan pemaksaan dari suatu struktur resmi yang diadakan oleh pemerintah.
4. Adanya masalah pengaruh luar yang menuju pada kegagalan pasar dan menginginkan pemecahan melalui pemerintah, baik melalui penyediaan anggaran, subsidi maupun pajak.

5. Nilai-nilai sosial meliputi adanya penyesuaian dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan.

Berdasarkan batasan teori kebijakan publik yang disampaikan oleh para ilmuwan tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik memiliki dimensi yang luas sehingga menjadi sangat dinamis dan bisa dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan cara penelitian. Arti dan hakikat kebijakan publik adalah sebuah kebijakan yang diresmikan oleh pejabat pemerintah atau pihak yang berkuasa dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat (*public interest*), dimana kepentingan rakyat itu adalah keseluruhan yang utuh dari perpaduan dan pembentukan pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat.

2.1.3 Teori Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan analisis terhadap implementasi kebijakan, pengumpulan data, serta penilaian terhadap hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran awal. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk memberikan masukan yang berbasis bukti kepada pembuat kebijakan, sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki, mengganti, atau menghentikan kebijakan tersebut. Selain itu, evaluasi juga penting untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas kebijakan di masa depan. Hasil evaluasi yang baik akan memastikan

bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan menggunakan sumber daya secara optimal.

Menurut Lester dan Stewart dalam Muetia (2001:83-84) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang. Kegiatan evaluasi merupakan tahap penting bagi keseluruhan proses analisis kebijakan publik.

Menurut Jones dalam Affrian (2023:75) evaluasi kebijakan harus mencakup sejumlah kegiatan, antara lain pengkhususan (*specification*), pengukuran (*measurement*), analisis, dan rekomendasi. Pengkhususan (*specification*) adalah yang paling penting di antara kegiatan lainnya karena mencakup pengidentifikasian tujuan atau kriteria melalui mana program tersebut akan dievaluasi. Ukuran-ukuran kriteria ini juga akan digunakan dalam proses penilaian manfaat program. Selanjutnya, kegiatan pengukuran (*measurement*) yang berkaitan dengan aktivitas mengumpulkan data-data yang bersangkutan paut dengan objek yang dievaluasi. Sementara kegiatan analisis mencakup penggunaan data-data yang sudah

dikumpulkan guna menyusun kesimpulan. Terakhir adalah memberikan rekomendasi terkait hal-hal yang harus diperbaiki ke depannya.

Adapun indikator atau kriteria evaluasi menurut Dunn dalam Affrian (2023:92-93) sebagai berikut:

1. Efektifitas: Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai.
2. Efisien: Seberapa banyak usaha di perlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan: Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
4. Perataan: Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.
5. Responsivitas: Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok-kelompok tertentu.
6. Ketepatan: Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

2.1.4 Program Penanggulangan Kemiskinan

Program penanggulangan kemiskinan merupakan inisiatif yang dijalankan oleh pemerintah atau organisasi dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan kemiskinan di suatu wilayah atau negara. Strategi yang diterapkan dalam program ini meliputi berbagai pendekatan, seperti pemberian bantuan sosial, peningkatan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor pertanian dan ekonomi lainnya, serta pemberdayaan perempuan.

Bantuan sosial yang disediakan dapat berupa dukungan finansial atau non-finansial seperti tunjangan sosial, subsidi makanan, layanan kesehatan terjangkau, dan bantuan pendidikan. Selain itu, fokus pada peningkatan akses pendidikan mencakup pemberian beasiswa, transportasi, dan program khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin. Peningkatan layanan kesehatan melibatkan penyediaan fasilitas kesehatan yang terjangkau dan program vaksinasi.

Aspek ekonomi dipertajam melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan upaya untuk membuka akses ke pasar kerja yang lebih baik. Pembangunan infrastruktur esensial, seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik, menjadi bagian integral dari program ini, khususnya di daerah terpinggirkan.

Menurut Josep (2018:70-71) Strategi dan kebijakan alternatif menanggulangi kemiskinan di desa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan luas kepada masyarakat desa memperoleh layanan pendidikan memadai dan gratis. Pemerintah perlu mengembangkan sistem pendidikan nasional yang berorientasi keberpihakan kepada orang miskin. Pendidikan yang ditawarkan di Indonesia cenderung mahal dan sulit dijangkau orang miskin. Karenanya, mereka memilih tidak menyekolahkan anak mereka, sebab beban biaya pendidikan tidak sebanding kemampuan keuangan mereka.
2. Redistribusi lahan dan modal pertanian yang seimbang. Ketimpangan kepemilikan lahan pertanian, memperlebar jurang kemiskinan antar-masyarakat di pedesaan. Sebagian besar tanah pertanian dimiliki tengkulak lokal dan tuan tanah. Akibatnya, tanah pertanian tidak memberikan

penghasilan cukup bagi orang desa yang memiliki tanah dan modal pertanian terbatas.

3. Mendorong perkembangan investasi pertanian dan pertambangan ke daerah pedesaan. Pembukaan investasi pertanian dan pertambangan dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat desa. Dengan begitu, pendapatan mereka akan meningkat dan berpengaruh pada perubahan kesejahteraan hidup.
4. Membuka kesempatan luas kepada masyarakat desa memperoleh kredit usaha yang mudah. Sistem kredit saat ini (seperti KUR), belum memberikan kemudahan usaha bagi masyarakat desa dan sering salah sasaran. Karena itu, diperlukan kebijakan baru yang memberikan jaminan kredit usaha memadai bagi masyarakat desa.
5. Memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan masyarakat desa. Dapat dilakukan melalui mekanisme Jumbung desa yang memberikan kesempatan sama kepada masyarakat, memperoleh sumber kebutuhan secara terorganisir.
6. Memperkenalkan sistem pertanian modern dengan teknologi baru yang memberikan kemudahan bagi masyarakat menggali sumber pendapatan yang memadai. Teknologi pertanian diperbanyak dan diberikan cuma-cuma kepada petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

7. Memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat dengan sistem layanan kesehatan gratis, memperbanyak PUSKESMAS dan unit layanan kesehatan kepada masyarakat desa.
8. Memberikan jaminan asuransi dan jaminan sosial terhadap masyarakat desa. Jaminan ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan memberikan semangat hidup yang lebih berarti. Sistem yang ada saat ini, meskipun diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia namun mekanismenya tetap menyulitkan masyarakat miskin, terutama di desa yang tidak melek sistem jaminan. Untuk itu, pemerintah berkewajiban memberikan jaminan asuransi memadai kepada masyarakat miskin.
9. Memperkuat komitmen eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki tatanan pemerintahan. Tatanan pemerintahan dewasa ini, memberikan keleluasaan terjadinya praktik korupsi dalam seluruh level pemerintahan. Perbaikan tatanan pemerintahan, menjadi keyword program penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin.

2.1.5 Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan langsung tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin di Indonesia. PKH berfungsi sebagai salah satu program jaring pengaman bagi masyarakat miskin agar terlindungi dari kemungkinan kondisi krisis. PKH dalam jangka panjang diharapkan dapat menghentikan siklus kemiskinan antar generasi melalui perbaikan kondisi pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM), peluang

lapangan kerja yang lebih luas akan terbuka bagi anak dari keluarga PKH di masa depan. Dengan demikian generasi berikutnya dapat terlepas dari perangkap kemiskinan. Pada tahun 2018, PKH juga sudah menyusuri lebih dari 10 juta rumah tangga miskin dan sangat miskin di Indonesia (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020).

Sejak 2007 pada saat PKH diterapkan sebagai program uji coba yang baru mencapai sekitar 350.000 KPM sampai saat ini, PKH terus mengalami perkembangan baik dari segi cakupan jumlah KPM maupun cakupan bantuan. Muatan program terus dibenahi salah satunya dengan dilaksanakannya intervensi *Family Development Session (FDS)* atau disebut juga Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) pada tahun 2015 (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH), dalam Pasal 2 menyebutkan tujuan dari program keluarga harapan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

2.1.5.1 Kewajiban Peserta PKH

Ada beberapa kewajiban peserta PKH yang harus di penuhi sebagai peserta PKH, yaitu sebagai berikut:

1. Ibu hamil / nifas
 - a) Pemeriksaan kehamilan di faskes sebanyak 4 kali dalam 3x trimester.
 - b) Melahirkan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
 - c) Pemeriksaan kesehatan 2 kali sebelum bayi usia 1 bulan.
2. Bayi
 - a) Usia 0-11 bulan imunisasi lengkap serta pemeriksaan berat badan setiap bulan.
 - b) Usia 6-11 bulan mendapat suplemen vitamin A.
3. Balita/anak usia dini
 - a) Usia 1-5 tahun imunisasi tambahan dan pemeriksaan berat badan minimal 2 kali dalam satu tahun.
 - b) Usia 5-6 tahun Pemeriksaan berat badan minimal 2 kali dalam setahun dan mendapatkan vitamin A sebanyak 2 kali dalam setahun.
 - c) Usia 6-7 tahun timbang badan di fasilitas kesehatan minimal 2 kali dalam setahun.
4. Anak sekolah
 - a) Usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD, SMP, SLTA)

b) Terdaftar di sekolah/pendidikan kesetaraan.

c) Minimal 85 % kehadiran dikelas.

5. Penyandang disabilitas berat

a) Pemeliharaan kesehatan minimal satu tahun sekali oleh tenaga kesehatan.

b) Mengikuti kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial (*day care dan home care*).

6. Lansia

a) Pemeriksaan kesehatan minimal satu tahun sekali oleh tenaga kesehatan.

b) Mengikuti kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial (*day care dan home care*).

2.1.6 Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Konsep kemiskinan melibatkan kekurangan dalam hal pendapatan, aset, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kesempatan kerja. Kemiskinan dapat diukur secara relatif atau absolut, tergantung pada konteks dan standar hidup yang digunakan.

Secara relatif, kemiskinan diukur dengan membandingkan pendapatan atau kekayaan individu atau keluarga dengan tingkat rata-rata dalam masyarakat. Jika pendapatan atau kekayaan seseorang berada di bawah ambang batas yang

ditetapkan, mereka dianggap miskin relatif. Pendekatan ini mempertimbangkan ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Di sisi lain, kemiskinan absolut mengacu pada ketidakmampuan individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, perumahan yang layak, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pendekatan ini didasarkan pada standar minimum yang dianggap diperlukan untuk hidup yang layak.

Konsep kemiskinan juga melibatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang menyebabkan dan mempertahankan kemiskinan. Faktor-faktor ini meliputi kurangnya kesempatan pendidikan dan pekerjaan, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, konflik sosial dan politik, diskriminasi, dan kurangnya akses ke layanan dasar. Kemiskinan juga dapat menjadi siklus yang sulit untuk ditinggalkan, dengan kemiskinan generasi sebelumnya mempengaruhi peluang dan akses yang dimiliki oleh generasi berikutnya.

Untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan pendekatan yang *holistik* dan berkelanjutan. Ini melibatkan kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses ke pendidikan, pelatihan kerja, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar. Perlindungan sosial yang kuat, pemberdayaan ekonomi, dan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan juga penting dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, David Cox dalam Marien Pinontoan (2020:6) membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi:

1. Kemiskinan yang disebabkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya merupakan negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin tergeserkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan persyaratan global.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan yang disebabkan rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan yang disebabkan penggeseran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dirasakan oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin seperti konflik bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Ellis dalam Marien Pinontoan (2020:7) menyatakan bahwa dimensi kemiskinan melibatkan aspek ekonomi, politik dan sosial priskologis. Secara ekonomi kemiskinan dapat dijelaskan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam situasi ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan juga semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat memajukan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan hal ini, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan

sumberdaya yang dimiliki (*povertyline*). Cara seperti ini sering disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolut. Garis kemiskinan yang digunakan BPS sebesar 2,100 kalori per orang per hari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu atau pendekatan bank dunia yang menggunakan 1 dolar AS per orang per hari merupakan contoh pengukuran kemiskinan absolut.

Kemiskinan adalah sebuah kondisi yang berada di bawah garis kemiskinan nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos, dalam Marien Pinontoan, 2020).

Secara umum ciri-ciri penduduk miskin ditandai dengan keterbatasan pendapatan dan modal usaha, memiliki keterbatasan akses berbagai sarana kebutuhan dasar. Secara rinci dapat diuraikan dibawah ini.

1. Mereka hidup dibawah garis kemiskinan, pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal atau keterampilan. Faktor produksi umumnya sedikit, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan asset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan diperoleh tidak cukup.

2. Tingkat pendidikan golongan miskin pada umumnya rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar. Waktu mereka pada umumnya habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar. Demikian juga dengan anak-anak mereka. Tak dapat menyelesaikan sekolahnya oleh karena itu harus membantu orang tuanya untuk mencari nafkah tambahan.
3. Banyak diantara mereka yang tinggal di pedesaan, dan tidak mempunyai tanah garapan atau kalaupun ada relative kecil. Pada umumnya mereka sebagai buruh tani atau pekerja kasar di pertanian, tetapi kesinambungan kerja mereka menjadi kurang terjamin. Banyak diantara mereka lalu menjadi pekerja bebas (*self employed*) yang berusaha apa saja. Akibatnya dalam situasi penawaran tenaga kerja yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mengurangi mereka selalu hidup di bawah kemiskinan. Didorong oleh kesulitan hidup di desa, maka banyak diantara mereka mencoba berusaha ke kota (urbanisasi) untuk mengadu nasib.
4. Banyak diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau skill dan pendidikan. Sedangkan kota sendiri terutama di negara yang sedang berkembang tidak siap mampu menampung urbanisasi. Penduduk desa itu. Apabila di negara maju pertumbuhan sebagai penarik bagi masyarakat desa untuk bekerja di kota, maka proses urbanisasi di negara berkembang tidak disertai proses penyerapan tenaga kerja sehingga penduduk miskin yang pindah ke kota terdampak dalam kantong-kantong kemelaratan (*slumps*).

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 262/HUK/2022 tentang kriteria fakir miskin. Ada 9 kriteria fakir miskin, diantaranya:

1. Seseorang tidak memiliki tempat berteduh/ tempat tinggal sehari-hari.
2. Kepala keluarga atau pengurus keluarga yang tidak bekerja atau tidak berpenghasilan tetap.
3. Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir.
4. Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran.
5. Tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 tahun terakhir.
6. Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah atau plesteran.
7. Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng.
8. Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas.
9. Sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 watt atau bukan listrik.

2.1.7 Teori Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kapasitas individu, baik secara fisik, sosial, mental, maupun spiritual. Pembangunan manusia melibatkan berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kebudayaan, yang secara keseluruhan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kemampuan individu untuk mencapai potensi maksimalnya.

Menurut Asnidar dalam Bakhtiar Efendi, dkk (2024:2) peran penting Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam pembangunan ekonomi modern sebagai pembangunan manusia yang baik memungkinkan produksi juga dapat maksimal. Kualitas orang baik dapat berinovasi untuk mengembangkan faktor produksi yang ada. Selain itu, pembangunan manusia yang tinggi menyebabkan tinggi populasi, yang meningkatkan konsumsi ini memfasilitasi promosi pertumbuhan ekonomi

Menurut Bakhtiar Efendi, dkk (2024:7) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai pencapaian pembangunan manusia di suatu negara. IPM mengintegrasikan berbagai aspek kesejahteraan manusia dengan tujuan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kualitas hidup di suatu negara. Berikut adalah komponen-komponen utama dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM):

1. Harapan hidup pada lahir

Harapan hidup pada lahir merupakan rata-rata usia yang diharapkan seorang bayi yang baru lahir akan hidup, jika tingkat kematian pada berbagai usia selama periode tersebut tetap konstan. Hal ini bertujuan untuk mengukur kesehatan dan tingkat layanan kesehatan di suatu negara. Harapan hidup yang lebih tinggi umumnya mencerminkan sistem kesehatan yang lebih baik dan kondisi kehidupan yang lebih baik.

2. Pendidikan

a. Harapan pendidikan

Rata-rata tahun yang diharapkan seorang anak usia sekolah akan bersekolah sepanjang hidupnya. Ini mencerminkan akses dan kesempatan pendidikan di negara tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengukur potensi akses pendidikan di masa depan bagi anak-anak dan remaja.

b. Rata-rata lama sekolah

Teori indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi rata-rata lama tahun pendidikan yang telah diterima oleh penduduk dewasa (usia 25 tahun ke atas). Ini mengukur pencapaian pendidikan nyata di kalangan orang dewasa. Hal ini bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian pendidikan yang sebenarnya di masyarakat dan kualitas sistem pendidikan yang ada.

3. Pendapatan

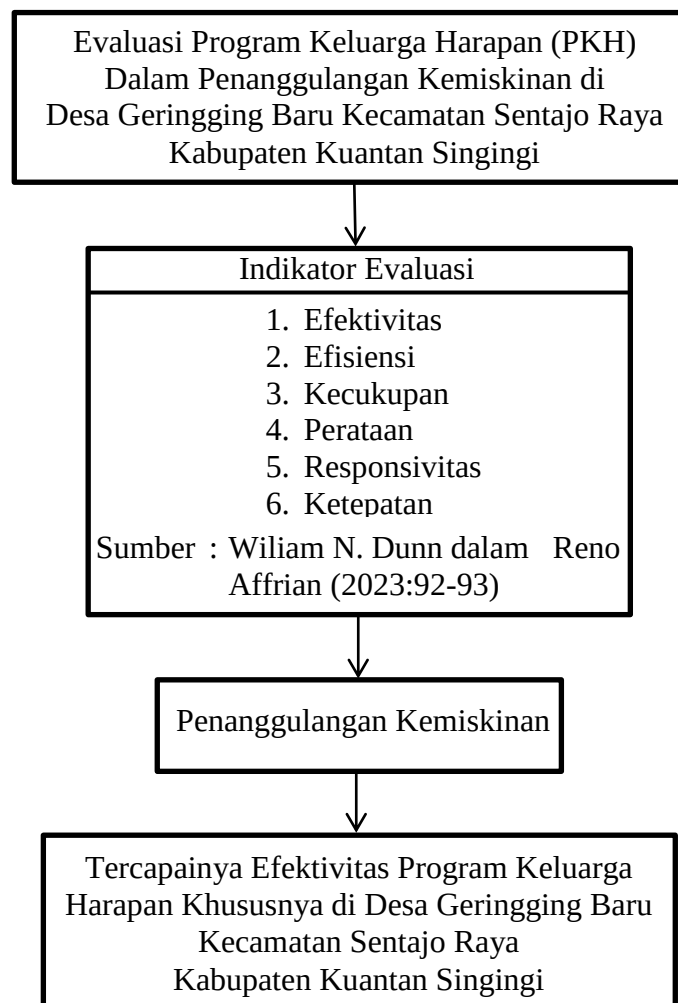
Pendapatan diukur menggunakan *Gross National Income (GNI)* per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP). Ini memberikan gambaran tentang rata-rata pendapatan yang diterima oleh individu di negara tersebut. Bertujuan untuk mengukur tingkat kemakmuran ekonomi dan kapasitas individu untuk mendapatkan barang dan jasa.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu alur bagi penulis untuk dijadikan konsep atau dasar-dasar pemikiran agar memperkuat indikator yang melatar belakangi

penelitian. Sesuai dengan judul proposal yang diangkat peneliti maka peneliti membuat sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.



2.3 Definisi Operasional

2.3.1 Efektivitas adalah sejauh mana tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan cara yang optimal dan sesuai dengan rencana. Konsep ini berfokus pada hasil yang diperoleh dan memastikan bahwa

aktivitas atau proses yang dilakukan memberikan manfaat maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

2.3.2 Efisiensi adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin, baik dalam hal waktu, tenaga, maupun biaya. Konsep ini berfokus pada proses dan cara kerja, memastikan bahwa setiap langkah dilakukan secara tepat guna tanpa pemborosan. Dalam praktiknya, efisiensi sering diukur melalui perbandingan antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan, dengan tujuan memaksimalkan produktivitas.

2.3.3 Kecukupan adalah kondisi di mana suatu hal dianggap memadai atau cukup untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu. Konsep ini menekankan bahwa jumlah atau kualitas sesuatu, seperti sumber daya, informasi, atau hasil, sudah sesuai dengan standar atau batas minimum yang diperlukan. Kecukupan dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH) mengacu pada sejauh mana bantuan sosial yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

2.3.4 Perataan adalah upaya untuk menciptakan distribusi yang merata atau seimbang dalam suatu sistem, baik itu terkait sumber daya, peluang, maupun hasil. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan yang ada di antara individu atau kelompok dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, dan pembangunan.

2.3.5 Responsivitas adalah konteks Program Keluarga Harapan (PKH) mengacu pada kemampuan program tersebut untuk menanggapi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh para penerima manfaat secara cepat, tepat, dan efektif. Hal ini mencakup kemampuan pendamping PKH, pemerintah, dan pihak terkait lainnya dalam memberikan bantuan, informasi, atau solusi ketika keluarga penerima manfaat menghadapi kendala, baik dalam pemenuhan syarat program maupun dalam memanfaatkan bantuan.

2.3.6 Ketepatan adalah sejauh mana suatu tindakan, keputusan, atau hasil sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. dalam Program Keluarga Harapan (PKH) merujuk pada kemampuan program ini untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan benar-benar sampai kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketepatan ini mencakup aspek sasaran, waktu, jumlah bantuan, serta pemanfaatannya oleh penerima manfaat.

2.4 Konsep Variabel

Tabel 2.1: Konsep Operasionalisasi Variabel Penelitian Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Variable	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
Evaluasi	Perogram Keluarga Harapan (PKH)	Efektivitas	a.Manfaat program b.Kepuasan terhadap nominal	1.Sangat Baik 2.Baik 3.Cukup Baik 4.Kurang Baik 5.Tidak Baik
		Efisiensi	a.Nominal besaran dana PKH b.Lamanya proses pencairan	1.Sangat Baik 2.Baik 3.Cukup Baik 4.Kurang Baik 5.Tidak Baik
		Kecukupan	a.Pemenuhan Kebutuhan PKH b.Kecukupan nominal bantuan dana terhadap kebutuhan penerima PKH	1.Sangat Baik 2.Baik 3.Cukup Baik 4.Kurang Baik 5.Tidak Baik
		Perataan	a.Kesesuaian dan ketepatan dana bantuan PKH b.Pemerataan pelaksanaan PKH dalam memilih peserta	1.Sangat Baik 2.Baik 3.Cukup Baik 4.Kurang Baik 5.Tidak Baik
		Responsivitas	a.Kepuasan serta pengetahuan peserta PKH b.Saran atau masukan masyarakat terhadap program	1.Sangat Baik 2.Baik 3.Cukup Baik 4.Kurang Baik 5.Tidak Baik
		Ketepatan	a.Ketepatan penerima PKH berdasarkan kriteria kemiskinan b.Kesesuaian pelaksanaan PKH	1.Sangat Baik 2.Baik 3.Cukup Baik 4.Kurang Baik 5.Tidak Baik

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2024.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2020:16-17) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada *filsafat positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Metode penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2018:86) adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2020:126) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yakni seluruh masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya sebanyak 88 orang.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2018:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini yakni seluruh KPM PKH Desa Geringging Baru sebanyak 88 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik *Simple Random Sampling* yang dihitung melalui rumus Slovin sebagai berikut :

$$\text{Rumus Slovin: } n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Dimana :

n : Jumlah Sampel

N : Populasi

E : Persepsi akibat kesalahan pengambilan sampel yang di tolerir (15% = 0,15)

Dari rumus slovin di atas, maka sampel dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{88}{1+87(0,15)^2}$$

$$n = \frac{88}{1+87(0,02)}$$

$$n = \frac{88}{1+1,74}$$

$$n = \frac{88}{2,74}$$

$$n = 32,1 = 32 \text{ responden (dibulatkan ke atas)}$$

Berdasarkan rumus slovin diatas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 32 orang.

Tabel 3.1: Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

No.	Nama Responden	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1.	Kepala Desa Geringging Baru	1	1	100%
2.	Pendamping PKH Desa Geringging Baru	1	1	100%
3.	Masyarakat Penerima PKH di Desa Geringging Baru	88	32	37%
Jumlah Total		90	34	38%

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2024.

3.3 Sumber Data Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:137) mengemukakan penelitian dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui pengamatan sendiri, ataupun melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui kuesioner yang di teliti dan jawaban dari daftar pertanyaan yang akan diajukan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Geringging Baru.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer, meliputi data lokasi penelitian serta data lain yang mendukung masalah penelitian. Data

sekunder didapatkan melalui laporan ataupun informasi dari pihak terkait, literatur, dan buku. Selain itu juga, data sekunder bisa diperoleh melalui foto-foto yang berhubungan dengan penelitian di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya.

3.4 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu tentang Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singing.

3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singing yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 03 Phone 0760 Geringging Baru.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kuantitatif, untuk memperoleh data, fakta, serta informasi di lapangan, peneliti menggunakan teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut:

3.6.1 Observasi

Menurut Sugiyono (2018:145) observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

Kegiatan observasi pada umumnya merupakan aktivitas pengamatan dengan menggunakan pancaindra untuk mendapatkan informasi. Pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek penelitian, tentang perilaku alamiah, dinamika yang tampak, gambaran perilaku sesuai dengan situasi yang ada dan lain sebagainya.

3.6.2 Kuesioner

Menurut Sekaran dalam Amruddin, dkk (2022:75) kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelum dimana responden akan mencatat jawaban mereka, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas.

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Hardani, dkk (2020:149) dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.

Dokumentasi dapat dijadikan sebagai sebuah catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu yang dicatatkan, dikumpulkan menjadi sebuah arsip. Dokumen yang dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan metode tabel frekuensi, yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan menyajikan dalam bentuk angka-angka tanpa bermaksud membuat kesimpulan

yang berlaku umum. Adapun rumus yang digunakan untuk menganalisis tabel ini yaitu:

$$P = \frac{F}{N}$$

$$X = \frac{\sum(F.X)}{N}$$

Keterangan:

P = Persentase (%)

F = Frekuensi

X = Rata-rata

$\sum(F.X)$ = Jumlah Skor Kategori Jawaban

N = Jumlah Responden

Sebelum data diolah dan didapat hasilnya, untuk mengetahui hasil olahan data berada pada posisi dimana dalam penelitian ini penulis menentukan banyak kelas interval sebesar 10. Rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Panjang Kelas Interval} = \frac{\text{Rentang}}{\text{Banyak Kelas Interval}}$$

Dimana :

Rentang = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah

Banyak kelas interval = 10

$$\text{Panjang Kelas Interval} = \frac{10-1}{10}$$

$$= 0,9$$

Analisis data juga menggunakan skala likert untuk memudahkan analisis pernyataan yang digunakan kepada responden. Pemberian skor dimulai dari nilai tertinggi dengan skor 5 dan skor terendah 1.

Menurut Abdullah, dkk (2021:69) skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena tertentu di masyarakat. Adapun skor berdasarkan skala likert yaitu:

SB = Sangat Baik diberi skor 5

B = Baik diberi skor 4

CB = Cukup Baik diberi skor 3

KB = Kurang Baik diberi skor 2

TB = Tidak Baik diberi skor 1

Untuk menjabarkan data kuantitatif kedalam bentuk angka-angka tersebut, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Total} = \text{Jawaban Responden} \times \text{Skor}$$

Menurut Sugiyono (2019:148) setelah data diolah dan didapatkan hasilnya, untuk mengetahui hasil olahan data berada pada posisi dimana. Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut:

$$1,00 - 1,89 = \text{Tidak Baik}$$

$$1,90 - 2,79 = \text{Kurang Baik}$$

$$2,80 - 3,69 = \text{Cukup Baik}$$

$$3,70 - 4,59 = \text{Baik}$$

$$4,60 - 5,00 = \text{Sangat Baik}$$

Setelah data terkumpulkan, penulis memisahkan dan melaporkan data tersebut menurut jenisnya dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase. Dalam penelitian ini data analisa data secara Deskriptif Kuantitatif yaitu memberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti dengan menganalisa secara seksama lalu menarik kesimpulan dan pada akhirnya memberikan saran-saran.

3.8 Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian Tentang Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singing Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2: Jadwal Penelitian Tentang Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singing Tahun 2024.

NO	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2024-2025															
		Sep/Okt				Nov/Des				Jan-Feb				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■															
2	Pembuatan Proposal		■														
3	Bimbingan Proposal			■	■	■	■										
4	Ujian Proposal						■										
5	Revisi Proposal							■	■	■							
6	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■				
7	Ujian Skripsi															■	
8	Revisi Skripsi																■

Sumber: Modifikasi Peneliti Tahun 2024

VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, mengenai Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah Cukup Baik, dengan nilai keseluruhan indikator tersebut di dapatkan nilai rata-rata 3,67 yang berada pada skala interval Cukup Baik. Berarti Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah Cukup Baik. Hal ini dikarenakan dari 6 sub indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan dari sebaran kuesioner Cukup Baik.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Program keluarga harapan perlu di evaluasi dan monitoring lebih baik lagi, melakukan sosialisasi baik secara nasional terlebih di daerah pedalaman secara terarah untuk memberikan kesadaran dan pemahaman yang benar mengenai program ini kepada semua pemangku kepentingan, baik aparat pelaksana maupun masyarakat. Kegiatan sosialisasi tersebut harus diatur secara tegas terarah dan sesuai dengan pedoman. Dan dalam penentuan RTM penerima bantuan diharapkan menggunakan data yang valid agar

lebih tepat sasaran. Setiap tahunnya PKH harus memperbaharui data penerima bantuan PKH, agar masyarakat yang sudah mampu dapat di berhentikan menjadi penerima bantuan PKH, sehingga masyarakat miskin lainnya yang belum menjadi peserta PKH dapat dijadikan peserta dan bisa menerima bantuan.

2. Dampak yang dirasakan keluarga penerima manfaat dalam waktu dekat menambah keuangan keluarga, sementara dampak dalam jangka panjang diharapkan keluar dari rantai kemiskinan belum terlihat, adapun yang di *graduasi* atau dikeluarkan oleh petugas dalam kepesertaan PKH disebabkan sudah mampu, yang bersangkutan sudah mampu sebelum mendapatkan bantuan PKH, diharapkan kepada aktor pelaksana tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan benar-benar diverifikasi dan divalidasi keluarga-keluarga yang seharusnya mendapat bantuan sesuai syarat-syarat dan komponen yang telah ditetapkan sehingga bantuan tersebut tepat sasaran, adapun keluarga penerima manfaat yang sudah mampu tetapi belum di *graduasi* atau dikeluarkan diharapkan para aktor pelaksana bisa mengambil langkah yang tepat, tanggap dan sesuai prosedur.
3. Kiranya peserta PKH dapat mengelola dan menggunakan bantuan dana sebaik-baiknya dan tidak disalah gunakan manfaatnya.
4. Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kedepannya lebih memfokuskan pada proses menyadaran peserta PKH agar tidak ada lagi ketergantungan terhadap bantuan-bantuan lainnya.

5. Selain bantuan tunai, disarankan untuk mengembangkan program pendukung seperti pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, atau fasilitasi usaha kecil, agar penerima manfaat PKH dapat lebih mandiri secara ekonomi di masa depan.
6. Perlu ditinjau apakah pelaksanaan PKH telah merata di seluruh wilayah Desa Geringging Baru, sehingga tidak ada keluarga miskin yang luput dari bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Krimuddin, dkk. 2021. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Affrian, Reno. 2023. *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: Cv Bintang Sementara Media.
- Amruddin, dkk. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jawa Tengah: Pradina Pustaka.
- Effendi, Bakhtiar, dkk. 2024. *Teori Indeks Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi*. Jawa Tengah: Tahta Media Group.
- Fiantika, Feny Rita, dkk. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hendrayady, A, dkk. 2022. *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
- Josep. 2018. *Konsep Dan Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta Selatan: INDOCAMP.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2020. *Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan Pasca Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga*. Jakarta Timur: Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI.
- M. M, Nurkaidah. 2022. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Pengentasan Kemiskinan Nelayan Tradisional di Indonesia*. Bandung: Eksismedia Grafisindo (Eksisgraf).
- Muetia, Intan Fitri. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja.
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv. Harfa Creative.
- Nugraha, Budi, dkk. 2022. *Teori Administrasi*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.

Pinontoan, Marien. 2020. *Konsep Dasar Kemiskinan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Kajian Teoretis, Pragmatis dan Holistik*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.

Pramono, Joko. 2022. *Kajian Kebijakan Publik: Analisis Implementasi dan Evaluasinya di Indonesia*. Surakarta: UNISRI Press.

Setiawan, Hari Harjanto, dkk. 2020. *Kewirausahaan Sosial Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi*. Jakarta: Puslitbang Kementerian Sosial RI.

Sugiyono. 2015. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, Cv.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cetakan ke-26.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cetakan ke-2.

Tjilen, Alexander phuk. 2019. *Konsep, Teori Dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung)*. Bandung: Nusa Media.

B. Jurnal

Kholif, Khodziah Isnaini, dkk. 2015. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawar Blandong Kabupaten Mojokerto". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 2. No. 4. Hal. 709-714.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

